

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah sebagai respons terhadap krisis multidimensional yang kompleks, yang mencakup tekanan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada awalnya, Turki menerapkan kebijakan *open door* yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, Konvensi Jenewa 1951, serta doktrin *zero problems with neighbours*, yang sejalan dengan identitas neo-Ottomanisme dan aspirasi *soft power* negara tersebut. Namun, seiring berlarutnya krisis pengungsi dan meningkatnya ketegangan sosial, tekanan ekonomi, serta kekhawatiran keamanan nasional, kebijakan ini mengalami transformasi yang signifikan. Untuk menganalisis perubahan ini, penelitian menggunakan model perubahan kebijakan luar negeri Jakob Gustavsson yang menekankan pengaruh faktor politik dan ekonomi, baik domestik maupun internasional, dalam mendorong perubahan arah kebijakan. Sejak tahun 2018, perubahan kebijakan luar negeri Turki tercermin melalui pembangunan tembok perbatasan, peluncuran operasi militer di Suriah, dan institusionalisasi program pemulangan sukarela. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan mencerminkan *goal change*, yaitu pergeseran tujuan strategis dari yang semula bersifat normatif menuju orientasi yang lebih realistis demi menjaga stabilitas internal dan keamanan nasional.

ABSTRACT

This research examines the evolution of Turkey's foreign policy towards Syrian refugees as a response to a complex and multidimensional crisis involving social, economic, political, and security pressures at both the domestic and international levels. Initially, Turkey adopted an open-door policy inspired by humanitarian principles, the 1951 Geneva Convention, and the "zero problems with neighbours" doctrine, aligning with its neo-Ottomanist identity and soft power aspirations. However, the prolonged nature of the refugee crisis, combined with growing societal tensions, economic strain, and national security concerns, triggered a significant policy transformation. To analyze this shift, the study employs Jakob Gustavsson's foreign policy change model, which highlights the influence of both domestic and international political-economic factors in driving policy transformation. From 2018 onwards, Turkey's foreign policy visibly shifted through the construction of border walls, military operations in Syria, and the institutionalization of voluntary return programs. The findings demonstrate that Turkey's policy change reflects not merely programmatic adjustments but a strategic goal change, where the original normative objectives gave way to more pragmatic goals centered on internal stability and national security.